



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 466 /404.101.2/B/2025

TENTANG

RENCANA AKSI BELA NEGARA
TAHUN 2025-2029

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan dan penguatan ideologi, karakter, dan wawasan kebangsaan masyarakat, perlu dilaksanakan pembinaan kesadaran bela negara yang berkesinambungan;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan kesadaran bela negara yang berkesinambungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyusun rencana aksi bela negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rencana Aksi Bela Negara Tahun 2025-2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6413);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6615);
6. Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2022 tentang Kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 184);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 583);
8. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 455);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648).

Memperhatikan : 1. Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Aksi Bela Negara di Daerah Direktorat Bina Ideologi, Karakter, dan Wawasan Kebangsaan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024;

2. Surat Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Nomor 200.2.2/2-540/Polpum tanggal 8 Juli 2025 tentang Penyusunan Rencana Aksi Bela Negara di Daerah 2025-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Bela Negara Tahun 2025-2029, dengan daftar Rencana Aksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Rencana Aksi Bela Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan himpunan upaya peningkatan kesadaran bela negara yang dilakukan untuk Perangkat Daerah untuk menanamkan nilai bela negara serta pembudayaan sikap dan aksi bela negara di masyarakat dengan tujuan untuk menjaga komitmen pejabat terkait sebagai penanggungjawab atas kesinambungan program, kegiatan, dan subkegiatan yang mendukung peningkatan kesadaran bela negara.
- KETIGA : Rencana Aksi Bela Negara memuat kebijakan bela negara, aksi bela negara, program/kegiatan/subkegiatan terkait dan penanggung jawab.
- KEEMPAT : Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Rencana Aksi Bela Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dibentuk Tim Kerja Bela Negara.
- KELIMA : Tim Kerja Bela Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, mempunyai tugas:
- a. mengidentifikasi kegiatan di instansi masing-masing yang mendukung peningkatan kesadaran bela negara, dengan memedomani 5 (lima) nilai dasar bela negara dan indikatornya;
 - b. melakukan penelaahan terhadap usulan perangkat daerah, dengan memedomani 5 (lima) nilai dasar bela negara dan indikatornya;
 - c. melakukan sinkronisasi terhadap himpunan kebijakan dan aksi bela negara dengan program/kegiatan/subkegiatan sesuai nomenklatur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai kodifikasi, klasifikasi, dan nomenklatur perencanaan dan keuangan daerah;
 - d. memastikan ketersediaan anggaran pada program/kegiatan/subkegiatan untuk melaksanakan aksi bela negara;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan program berjalan sesuai dengan rencana; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan kegiatan peningkatan kesadaran bela negara.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, Tim Kerja Bela Negara berkewajiban untuk melaporkan hasilnya secara tertulis dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETUJUH : Susunan keanggotaan Tim Kerja Bela Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDELAPAN : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 17 November 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/ 466 /404.101.2/B/2025

TANGGAL : 17 November 2025

RENCANA AKSI BELA NEGARA TAHUN 2025-2029

	NILAI DASAR BELA NEGARA	INDIKATOR BELA NEGARA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN
				2.11.04	5	2.11.03.2.02	6	
1	2	3	4	2.11.04	5	2.11.03.2.02	6	7
1.	Cinta Tanah Air	a. Mencintai, menjaga dan melestarikan Lingkungan Hidup	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.11.03.2.02.0001 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
				2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup	2.11.03.2.02.0003 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
				2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Penyuluhan Lingkungan Untuk Masyarakat	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.11.08.2.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup

1	2	3	4	5	6	7
				2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, dan Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.11.08.2.01.0003 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup
				2.11.8 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, dan Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.11.08.2.01.0004 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup
				2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.11.09.2.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lemba ga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
		b. Menghargai dan Menggunakan Karya Anak Bangsa		3.30.7 PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	3.30.07.2.01.0006 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota

1	2	3	4	5	6	7
		c. Menggunakan Produk Dalam Negeri	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA	3.30.7 PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	3.30.07.2.02	6 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
			KECAMATAN	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.06	7.01.03.2.06.0004 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri
		d. Menjaga Nama baik bangsa dan negara.	DINAS PARIWISATA, PEMUDA, DAN OLAHRAGA	2.19.03 RAM PENGEMBANGAN DAYA SANGGULAH RAGAN	2.19.03.2.03	2.19.03.2.03.0006 Seleksi Atlet Daerah
			DINAS PARIWISATA, PEMUDA, DAN OLAHRAGA	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SANGGULAH RAGAN	2.19.03.2.03	2.19.03.2.03.0007 Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga
			DINAS PARIWISATA, PEMUDA, DAN OLAHRAGA	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SANGGULAH RAGAN	2.19.03.2.03	2.19.03.2.03.0009 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Provinsi
			DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	3.30.05.2.01	3.30.05.2.01.0002 Pameran Dagang Nasional

1	2	3	4	5		6		7
						(Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
			DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdaftar pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.30.05.2.01.0003 Pameran Lokal
			DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdaftar pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan 3.30.05.2.01.0004
			DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA	3.30.05	PROG RAM PENGEMBANGAN EKSPOR	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdaftar pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Citra Produk Ekspor 3.30.05.2.01.0005

1	2	3	4	5		6	7		
		e. Menjaga dan memahami seluruh ruang wilayah NKRI	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.22.04.2.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/kota
		f. Mengenal Wilayah Tanah Air Tanpa Rasa Fanatisme Kedaerahan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah
			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/kota	2.22.05.2.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya
			KECAMATAN	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

1	2	3	4	5	6	7
			KECAMATAN	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.01.05.2.01.0002 Pembinaan dan Persatuan Bangsa Kesatuan Bangsa
2.	Sadar Berbangsa dan Bernegara	a. Disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan.				
		b. Menghargai dan menghormati Keanekaragaman suku, agama, ras dan antar golongan.	KECAMATAN	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
		c. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi dan golongan.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Kepala Daerah	1.05.02.2.02.0004 Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah
			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Kepala Daerah	1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

1	2	3	4	5	6	7
			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Kepala Daerah	1.05.02.2.02.0011 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Kepala Daerah	1.05.02.2.02.0012 Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
		d. Bangsa terhadap bangsa dan negara sendiri	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.22.04.2.01.0001 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/kota
			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.22.04.2.01.0003 Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah
			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/kota	2.22.05.2.02.0003 Pemanfaatan Cagar Budaya
		e. Rukun berjiwa royong dalam masyarakat	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATA N, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan	2.13.05.1.01.0007 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

1	2	3	4	5	6	7
					Masyarakat Hukum Adat yang Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
			KECAMATAN	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat
			BADAN KEUANGAN	5.02.04 PROGRAM PENGLOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan daerah	5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
3.	Setia kepada Pancasila sebagai Ideologi Negara	a. Menjalankan hak kewajiban sesuai peraturan perundangan yang berlaku	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT, SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
	b. Memahami dan Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.		KECAMATAN	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	7.01.03.2.06.0001 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Aspek

1	2	3	4	5		6		7		
								Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara		
		c.	Meyakini pancasila sebagai dasar negara menjadikan pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	8.01.02.2.01.0011	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	8.01.02.2.01.0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	8.01.02.2.01.0011	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila
		d.	Menerapkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai musyawarah mufakat	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

1	2	3	4	5	6	7
	e.	Menghormati serta menjunjung tinggi HAM	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Kepala Daerah	1.05.02.2.02.0004 Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah
			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Kepala Daerah	1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Kepala Daerah	1.05.02.2.02.0011 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Kepala Daerah	1.05.02.2.02.0012 Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
	f.	Saling membantu dan tolong menolong antar sesama nilai luhur Pancasila untuk mencapai kesejahteraan	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Adat yang	2.13.05.1.01.0007 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

1	2	3	4	5	6	7
					Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
			KECAMATAN	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat
4.	Rela Berkorban untuk bangsa dan negara	a. Rela menolong sesama warga masyarakat yang mengalami kesulitan tanpa melihat latar belakang sosio kulturalnya.	KECAMATAN	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat
		b. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi dan golongan.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1.05.02.2.02.0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1.05.02.2.02.0004 Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

1	2	3	4	5	6	7
	c.	Menyumbangkan pikiran, kemampuan untuk kepentingan masyarakat, kemajuan bangsa, dan negara	KECAMATAN	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.02	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
	d.	Membela bangsa dan negara sesuai dengan profesi dan kemampuan masing-masing	DINAS PARIWISATA, PEMUDA, DAN OLAHRAGA	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.2.03	2.19.03.2.03.0006 Seleksi Daerah Atlet
			DINAS PARIWISATA, PEMUDA, DAN OLAHRAGA	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.2.03	2.19.03.2.03.0007 Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga
			DINAS PARIWISATA, PEMUDA, DAN OLAHRAGA	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.2.03	2.19.03.2.03.0009 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota
			DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.2.01	2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi

1	2	3	4	5	6	7
		e. Berpartisipasi aktif dan peduli dalam pembangunan masyarakat bangsa dan negara.	KECAMATAN	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
		f. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan Negara tanpa pamrih	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.2.04.0010 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/kota
5.	Mempunyai Kemampuan Bela Negara	a. Memiliki kemampuan, integritas dan kepercayaan diri yang tinggi dalam membela bangsa dan negara.	KECAMATAN	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

1	2	3	4		5		6		7
			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	8.01.02.1.01.0001	
				8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	8.01.02.1.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	8.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

1	2	3	4	5	6	7
			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	8.01.02.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	8.01.02.1.01.0005 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
		b. Mempunyai kemampuan memahami dan mengidentifikasi bentuk-bentuk ancaman di lingkungan masing-masing sehingga selalu siap tanggap dan lapor dini setiap ada kegiatan yang	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.05.02.1.01.0017 Pencegahan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli,

1	2	3	4	5	6	7
		merugikan dan mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat di lingkungannya masing-masing.				Pengamanan, dan Pengawalan
			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0004
				PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.05.03	1.05.03.2.01	1.05.03.2.01.0004
				PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/kota	Sosialisasi, Komunikasi, dan Informasi Edukasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman)
			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.05.03	1.05.03.2.02	1.05.03.2.02.0018
				PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.05.03	1.05.03.2.02	1.05.03.2.02.0028
				PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota

1	2	3		4		5		6		7
				BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANG AN BENCANA	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Alam
		c.	Senantiasa menjaga kesehatannya sehingga memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik.	DIINAS KESEHATAN	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
				DIINAS KESEHATAN	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.02.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
		d.	Memiliki Kecerdasan Emosional dan spiritual serta Intelegensi yang tinggi.	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT, SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
		e.	Memiliki pengetahuan tentang kearifan lokal dalam menyikapi setiap ancaman		-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
	f.	Memiliki kemampuan dalam memberdayakan kekayaan sumber daya alam keragaman hayati		-	-	-

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/ 466 /404.101.2/B/2025

TANGGAL : 17 November 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA BELA NEGARA

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Ngawi
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
3.	a. Ketua	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi
	b. Wakil Ketua	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi
4.	Sekretaris	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi
5.	Anggota:	a. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Ngawi; b. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi; c. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi; d. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi; e. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Ngawi; f. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi; g. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi; h. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi; i. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi; j. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi; k. Camat se-Kabupaten Ngawi.

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO